



Soroti Telatnya APBD Melawi-Mempawah

PONTIANAK - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat membidangi Keuangan dan Perbankan, Irsan memberikan tanggapan seputar telatnya RAPBD di dari Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Melawi menjadi APBD dalam bentuk Perda. "Di Kabupaten Melawi sudah tahun keempat seperti begini. Di Kabupaten Mempawah sepertinya kisruh



Irsan S, Ag

eksekutif-legislatif belum tuntas," ungkapnya, Jumat(6/12).

Menurut politisi PKB Kalbar ini kegagalan penetapan APBD tahun 2020 pada dua kabupaten tersebut hendaknya segera dievaluasi, mengingat pentingnya percepatan pengelolaan APBD tahun 2020. Sehingga tidak mengganggu segala

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Sambungan dari halaman 1

program kerja pemerintah di Mempawah dan Melawi.

Salah satu kuncinya yakni titik temu kesepakatan antara eksekutif-legislatif wajib terjadi. Dengan demikian kekuatan legalitas Perda APBD diperoleh. Ini juga sekaligus menghindari ego masing-masing demi kepentingan masyarakat setempat. "Sekaligus menghindari preseden buruk pada tahun-tahun beri-

kutnya," tukasnya.

Dia menambahkan menemukan titik temu antara Bupati-DPRD dua wilayah sepertinya sulit terjadi. Harusnya sesegera mungkin dilakukan investigasi mendalam dari Pemprov Kalbar. Dengan begitu akan ditemukan formulasi terbaik dalam penetapan APBD.

Komisi III DPRD Kalbar meyakini bahwa Pemprov Kalbar dapat segera menyelesaikan persoalan ini dengan se-

baik-baiknya tanpa menimbulkan persoalan lain menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara eksekutif-legislatif. "Ego begini seharusnya tidak perlu terjadi mengingat pelaksanaan APBD sebagai amanah konstitusi yang harus disukseskan bersama," tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyesalkan sampai saat ini masih ada dua kabupaten yang belum mengesahkan APBD lewat

peraturan daerah (Perda). Yakni Kabupaten Mempawah dan Melawi, dimana pihak Pemprov Kalbar bakal melakukan evaluasi mengenai masalah yang terjadi di kedua daerah tersebut.

"Jadi batas waktu penyusunan APBD sudah berakhir, 30 November. Nah ada dua yang tidak menyelesaikan Perda, Mempawah dan Melawi hal ini akan kami pelajari," katanya kepada awak media, kemarin.

Dia menyarankan jika pihak eksekutif sudah men-

jalankan semua tahapan dengan jelas dan benar, sementara pihak legislatif tidak mau mengesahkan, maka bisa dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbub). "Apalagi Melawi tahun ini adalah tahun keempat (terlambat pengesahan APBD)," ungkapnya.

Meski demikian, Midji sapaan akrabnya masih akan melakukan kajian terhadap kasus ini. Pemprov Kalbar bakal menurunkan tim langsung ke daerah yang bersangkutan. "Sebagai

wakil pemerintah pusat di daerah saya akan lakukan kewenangan itu. Bisa saja eksekutif disanksi bisa jadi dua-duanya. Kami sedang pelajari semuanya," tegasnya.

Hasilnya antara pihak eksekutif maupun legislatif jika memang terbukti bersalah maka akan disanksi. Dan bisa saja diterapkan untuk keduanya. Untuk eksekutif, bupati sebagai kepala daerah terancam tidak mendapatkan hak di luar gaji selama enam

bulan. Sama halnya dengan legislatif, DPRD juga terancam tidak mendapatkan hak di luar gaji selama enam bulan. Ia memastikan sanksi ini diberikan sesuai prosedur yang berlaku.

"Saya pastikan saya akan kenakan sanksi itu. Kalau misalnya Melawi (bisa) dua-duanya salah, Pak Panji (bupati) baru masuk November, sehingga dewan tak bisa bahas. Tapi kami masih kaji apakah salah dewan atau bupatinya," katanya. (den)